

Kesepakatan Buruk dan Dipaksakan Mengenai Tujuan Keuangan Baru pada COP29

Artikel Terjemahan

Baku, 26 November (Radhika Chatterjee dan Meena Raman): Keputusan untuk mengadopsi tujuan kolektif baru yang terukur mengenai keuangan (NCQG) telah dipaksakan pada pleno penutupan COP29, meskipun tidak ada konsensus.

Hal ini tercermin dengan jelas dalam pernyataan yang dibuat oleh India setelah palu, yang sangat menolak adopsi keputusan tersebut, dan mengkritik proses tersebut sebagai "diatur secara bertahap" oleh Presidensi COP29 dan sekretariat UNFCCC, meskipun mengetahui bahwa India memiliki keberatan terhadap teks tersebut. India juga menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada pendanaan iklim yang cukup dalam tujuan tersebut dan bahwa kesepakatan tersebut adalah "ilusi optik". [Lihat rincian lebih lanjut di bawah].

India tidak sendirian dalam keberatannya.

Negara-negara berkembang lainnya seperti Bolivia dan Nigeria mendukung pendirian India dalam menolak adopsi keputusan tersebut dan mengkritik tujuan tersebut karena tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang. Kuba dan Pakistan juga menyerukan kuantum tujuan yang sangat rendah. Negara-negara Kurang Berkembang (LDC) juga menyatakan kekecewaannya terhadap tujuan tersebut dan menaruh keraguan atas keputusan tersebut.

Intervensi negara-negara berkembang disambut dengan tepuk tangan yang sangat keras dan berkelanjutan, terutama dari pengamat masyarakat sipil dan banyak delegasi pemerintah negara berkembang.

Uni Eropa (UE) di sisi lain menyambut keputusan tersebut sebagai "kesepakatan yang luar biasa", dengan mengatakan bahwa "kita hidup di masa geopolitik yang benar-benar menantang dan kita seharusnya tidak memiliki ilusi bahwa keadaan akan segera membaik." Ini tampaknya merupakan referensi yang jelas terhadap kemungkinan keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Perjanjian Paris.

Para negosiator AS (di bawah Pemerintahan Biden), terlihat memberikan tekanan yang sangat besar di ruang perundingan dalam menentukan hasil akhir, dengan sikap yang jelas bahwa AS tidak dapat berkomitmen pada tujuan keuangan apa pun yang mewajibkan negara-negara maju untuk memberikan keuangan kepada negara-negara berkembang. Mereka terus mempertahankan posisi keras kepala mereka (bahkan sebelum hasil pemilu AS terakhir dan memang selama tiga tahun negosiasi tentang masalah tersebut), bahwa tujuan keuangan baru hanyalah angka mobilisasi sukarela, yang membutuhkan kontributor baru dari negara-negara

berkembang, Bank Pembangunan Multilateral (MDB), dan sektor swasta untuk ikut serta. Sikap AS ini dianut oleh negara-negara maju lain dalam Umbrella Group dan Uni Eropa.

Sementara aksi-aksi masyarakat sipil yang kuat menyerukan bahwa “tidak ada kesepakatan lebih baik daripada kesepakatan yang buruk”, sikap negara-negara maju dan ‘efek Trump’ memberikan kepercayaan pada narasi di antara negara-negara maju dan beberapa negara berkembang bahwa “kesepakatan yang lebih baik sama sekali tidak mungkin”.

Menurut banyak pengamat kawakan, sistem multilateral yang rapuh sekali lagi diselamatkan dari ambang kehancuran, melalui kesepakatan keuangan iklim yang buruk yang harus diamankan dengan “cara apa pun”, karena ‘COP Keuangan Baku’ tanpa kesepakatan keuangan dipandang sebagai sesuatu yang tidak terbayangkan.

Pokok utama dari keputusan yang diadopsi terdapat pada paragraf 7 dan 8. Paragraf 7 “menyerukan semua pelaku untuk bekerja sama guna memungkinkan peningkatan pendanaan bagi Pihak negara berkembang untuk aksi iklim dari semua sumber publik dan swasta hingga setidaknya USD 1,3 triliun per tahun pada tahun 2035”. Paragraf 8 memutuskan “untuk menetapkan tujuan, sebagai perluasan dari [tujuan USD 100 miliar per tahun], dengan Pihak negara maju sebagai pemimpin, setidaknya USD 300 miliar per tahun pada tahun 2035 untuk Pihak negara berkembang untuk aksi iklim – (a) Dari berbagai sumber, publik dan swasta, bilateral dan multilateral, termasuk sumber-sumber alternatif; (b) Dalam konteks aksi mitigasi dan adaptasi yang bermakna dan ambisius, dan transparansi dalam implementasi; (c) Mengakui niat sukarela Para Pihak untuk menghitung semua arus keluar terkait iklim dari dan pendanaan terkait iklim yang dimobilisasi oleh MDB untuk mencapai tujuan yang ditetapkan ...”

[Analisis kesepakatan pendanaan yang buruk akan menyusul dalam artikel TWN selanjutnya]
[Lihat pada artikel selanjutnya]

KEPUTUSAN DITEGASKAN SECARA KERAS

Sesi pleno terakhir yang diselenggarakan pada Minggu pagi, 24 November, diwarnai beberapa jeda, di mana negosiator utama Presidensi COP29, Yalchin Rafiyev dan timnya terlihat berkonsultasi dengan berbagai kelompok dan negosiator negara untuk mencapai konsensus pada beberapa isu, yang utama di antaranya adalah teks NCQG. Begitu Presiden COP29, Mukhtar Babayev mengumumkan bahwa resolusi pada isu-isu utama telah ditemukan, dokumen-dokumen utama disediakan di situs web UNFCCC oleh sekretariat.

Alih-alih melanjutkan sesi dengan cepat, berbagai bagian aula pleno dipenuhi beberapa kelompok dan Pihak yang berkerumun, dalam upaya untuk membujuk India agar mengizinkan adopsi keputusan keuangan. Para negosiator India terlihat dibawa ke ruang yang lebih kecil di area pleno oleh tim Presidensi untuk membahas teks NCQG lebih lanjut. Beberapa saat setelah para negosiator India meninggalkan ruangan itu, tim Presidensi, bersama dengan tim Presidensi COP28 UEA dan anggota sekretariat UNFCCC terlihat meninggalkan ruangan itu.

Tak lama kemudian, Babayev mengetuk palu untuk mengesahkan keputusan keuangan, tanpa sekali pun mengangkat kepalanya untuk melihat apakah ada permintaan untuk berbicara dari Pihak mana pun. Tiba-tiba, dan sangat mengejutkan banyak orang, aula itu dipenuhi tepuk tangan, terutama dari beberapa Pihak, dan tim Presidensi dan sekretariat UNFCCC di podium berdiri untuk berpelukan dan saling memberi selamat. Beberapa anggota delegasi India naik ke podium pada saat itu dan terlihat berbicara kepada tim Presidensi. Ini diikuti oleh beberapa negara yang berbicara untuk menyampaikan keberatan dan kekhawatiran mereka mengenai keputusan tersebut. [Menurut para pengamat, urgensi untuk meloloskan keputusan NCQG sangat kontras dengan cara pengambilan keputusan dan hasil lainnya, di mana Presiden COP berhenti sejenak untuk melihat apakah ada negara yang ingin berbicara sebelum meloloskan keputusan.

[Menurut proses UNFCCC yang telah ditetapkan, Presiden diharapkan untuk menghormati permintaan kesempatan bicara dari Para Pihak sebelum meloloskan keputusan apa pun, untuk menegaskan prinsip dasar konsensus, yang memandu pengambilan keputusan di UNFCCC. Metode meloloskan keputusan ini, meskipun tidak ada konsensus, bukanlah hal baru di UNFCCC. Hal itu terjadi pada tahun 2010 di Cancun, Meksiko dan pada tahun 2012 di Doha, Qatar.]

India dalam kritik pedasnya terhadap cara pengambilan keputusan keuangan tersebut, mengatakan bahwa, *“ini merupakan insiden yang tidak menguntungkan dan merupakan kelanjutan dari beberapa insiden yang tidak menguntungkan yang telah kita lihat karena tidak mengikuti inklusivitas, [dan] tidak menghormati posisi negara-negara. Kami telah memberi tahu Presidensi; [dan] kami telah memberi tahu sekretariat bahwa kami ingin membuat pernyataan sebelum keputusan apa pun tentang adopsi tersebut. Namun, ... [proses] ini telah diatur secara bertahap dan kami sangat, sangat kecewa dengan insiden ini ... Kepercayaan adalah dasar untuk semua tindakan dan insiden ini merupakan indikasi dari kurangnya kepercayaan; kurangnya kolaborasi dalam suatu masalah [penanganan krisis iklim] yang merupakan tantangan global yang dihadapi oleh kita semua.”* India menambahkan bahwa tantangan ini dihadapi *“terutama oleh negara-negara berkembang yang tidak bertanggung jawab atasnya. Kita dihadapkan dengan salah satu tantangan terbesar sepanjang masa. Yang akan menentukan keberadaan kita. Satu-satunya hal yang memungkinkan kita untuk melangkah maju dan melakukan tindakan yang sejalan dengan penanganan tantangan ini adalah kolaborasi dan kepercayaan di antara kita. Faktanya, kedua hal tersebut tidak berjalan dengan baik hari ini dan kami sangat dirugikan oleh tindakan Presidensi dan sekretariat ini.”*

Menjelaskan pentingnya kepercayaan, India menekankan *“kepercayaan bahwa akan ada tindakan dari mereka yang dapat mengambil tindakan. Negara-negara maju memiliki sarana untuk mengambil tindakan. Mereka harus setuju untuk memajukan tujuan nol bersih mereka, sasaran-sasaran tersebut, dan menjadi negatif bersih segera setelahnya. Namun, ada juga kepercayaan bahwa sumber daya keuangan, teknologi dan pengembangan kapasitas, sarana pelaksanaan, esensi dari setiap tindakan iklim ... yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang. Ini akan memungkinkan mereka yang ingin mengambil tindakan dan yang ingin bertahan hidup di dunia iklim yang berubah ini, tetapi tidak dapat melakukannya karena mereka*

membutuhkan dukungan dari negara-negara maju dan kami mencari kepercayaan dalam hal itu ... kami perlu melakukan upaya bersama untuk melakukan ini karena jelas apa yang terjadi hari ini bukanlah indikasi dari hal ini. [Kita perlu] percaya bahwa kita memahami kendala satu sama lain. Percaya bahwa kita akan bergerak bersama apa pun itu untuk masa depan yang lebih baik”.

India mengatakan bahwa, “sayangnya draft tentang NCQG yang telah diusulkan tidak berbicara atau mencerminkan atau menginspirasi keyakinan dan kepercayaan bahwa kita akan keluar dari masalah perubahan iklim yang serius ini ... Kami telah bekerja selama ... tiga tahun untuk ini agar memiliki mandat di hadapan kami ... untuk menetapkan NCQG. Sasaran tersebut dibayangkan dan diputuskan untuk ditetapkan dalam konteks kebutuhan dan prioritas negara-negara berkembang dan berdasarkan prinsip-prinsip ekuitas dan tanggung jawab bersama tetapi berbeda (CBDR). Keduanya merupakan hal mendasar bagi UNFCCC dan Perjanjian Paris-nya. Inilah esensi dari kolaborasi kami. Ini adalah satu-satunya dasar untuk datang ke badan PBB tempat semua negara kita dapat bersama-sama membahas dan mencapai solusi untuk mengatasi tantangan iklim yang kita semua hadapi. Negara-negara berkembang paling terdampak oleh perubahan iklim. Selain prioritas pembangunan kita, kita harus berjuang dengan tekanan dan krisis iklim tambahan. Negara-negara selatan global didorong untuk beralih ke jalur rendah karbon bahkan dengan mengorbankan pertumbuhan kita”.

India lebih lanjut mengatakan bahwa “kita harus menghadapi langkah-langkah Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM). Ada langkah-langkah lain yang diberlakukan oleh Pihak negara maju [yang] membuat transisi ... cukup sulit ... dalam lingkungan yang sangat, sangat kompetitif dan tidak bersahabat yang kita hadapi saat ini ... Kami kecewa dengan hasil yang jelas-jelas menunjukkan keengganan Pihak negara maju untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Saat kita berjuang untuk mengatasi perubahan iklim, hasil yang diusulkan dalam makalah ini akan semakin memengaruhi kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, sangat memengaruhi ambisi kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) dan implementasinya, dan menciptakan tantangan lebih lanjut bagi ketahanan kita, dan yang terpenting, akan sangat memengaruhi pertumbuhan”.

India menekankan bahwa mereka “tidak menerima usulan tujuan dalam bentuknya saat ini. Negara-negara maju memimpin untuk tujuan mobilisasi sebesar USD 300 miliar dan itu pun baru akan tercapai pada tahun 2035. Itu hampir 11 tahun kemudian. Dan itu pun dari berbagai macam sumber; jadi, itu harus bersifat pribadi; harus multilateral. Dan masih banyak yang harus dimobilisasi oleh negara-negara berkembang. Sasarannya terlalu kecil, terlalu jelas, [dan] jauh. Sekarang tahun 2035, sudah terlalu jauh. Perkiraan kami untuk tahun 2030 memberi tahu bahwa kita perlu melakukannya setidaknya USD1,3 triliun per tahun hingga tahun 2030”.

Sasaran mobilisasi USD300 miliar, katanya, “tidak menjawab kebutuhan dan prioritas negara-negara berkembang. Itu tidak sesuai dengan prinsip kemampuan dan ekuitas yang sesuai dengan CBDR. Terlepas dari perjuangan kita melawan dampak perubahan iklim, faktanya adalah negara-negara berkembang terus-menerus dituduh memiliki emisi [tinggi],

melupakan emisi per kapita negara-negara maju dan juga melupakan tanggung jawab historis negara-negara maju. Ini hanya menambah masalah yang ada bagi kita dan sasaran yang diusulkan tidak akan menyelesaikan apa pun bagi kita. Faktanya, kita harus menerapkan indeks ambisius dan tantangan ekonomi yang perlu kita hadapi dan mengatasi kebutuhan adaptasi. Jumlah yang diusulkan untuk dimobilisasi sangatlah sedikit. Jumlah yang sangat sedikit. Jumlah tersebut tidak akan memungkinkan aksi iklim yang kondusif yang diperlukan untuk kelangsungan hidup negara kita dan untuk pertumbuhan rakyat kita, mata pencaharian mereka” seraya menambahkan lagi bahwa “kita tidak dapat menerimanya ...”

Lebih lanjut, India mengatakan, *“kita tahu bahwa rekapitalisasi MDB adalah masalah yang belum ditangani ... Dalam situasi tersebut, kita juga tahu bahwa di masa mendatang, jika kita berpartisipasi, negara-negara berkembang akan menjadi dan akan menjadi kontributor utama untuk pembiayaan aksi iklim melalui paragraf 8c [dari keputusan].”*

“Menghitung mobilisasi keuangan melalui MDB ke dalam tujuan keseluruhan bukanlah perkembangan dari tujuan USD 100 miliar, tetapi merupakan pengalihan tanggung jawab negara-negara maju terhadap pemegang saham negara berkembang dari MDB”, India menekankan lebih lanjut, dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut “tidak lebih dari sekadar ilusi optik. Menurut pendapat kami, hal ini tidak akan menjawab besarnya tantangan yang kita semua hadapi... India menentang penerapan dokumen ini. Dan harap perhatikan dan hargai apa yang baru saja kami sampaikan dari ruang sidang ini... Kami sangat tidak senang, kecewa dengan proses ini, dan keberatan dengan penerapan [keputusan] ini”.

Bolivia menyatakan solidaritasnya dengan India dan mengatakan mendukung "posisi untuk meminta penolakan keputusan ini", seraya menambahkan bahwa India telah menyatakan perlunya memperkuat kesetaraan dalam negosiasi iklim ini, dengan membela hak jutaan orang untuk hidup bermartabat. "Dalam konteks konteks internasional yang tidak adil, hal ini tidak mungkin. Pembiayaan iklim, sebagaimana disepakati dalam COP ini, tidak memenuhi persyaratan negara-negara berkembang dan memperkuat sistem yang tidak adil di mana negara-negara maju tidak memenuhi kewajiban hukum mereka untuk menyediakan pembiayaan dan langkah-langkah implementasi bagi negara-negara berkembang".

Ditambahkan bahwa *"proses ini membutuhkan tingkat integritas yang tinggi" dan mengatakan bahwa negara-negara maju, meskipun memiliki teknologi canggih, "mengabaikan tujuan yang harus mereka capai untuk tahun 2050. Mereka mengabaikan sumber daya negara-negara berkembang yang terbatas dan membiarkan negara-negara tersebut bertanggung jawab dengan sumber daya yang sangat terbatas untuk mencapai tujuan yang tidak mungkin mereka capai ... Negara-negara maju ... memberi tekanan kepada negara lain untuk bertindak, [sementara mereka sendiri] bertanggung jawab atas perluasan terbesar dalam promosi dan produksi bahan bakar fosil. Mereka meloloskan kesepakatan bisnis besar-besaran dan mereka, sementara itu, menolak untuk menyediakan pembiayaan yang layak bagi negara-negara berkembang". Menyoroti penderitaan rakyat Palestina dan kemunafikan beberapa negara yang mendukung perang melawan Palestina, Bolivia mengatakan, “para ilmuwan telah mencoba untuk hanya memusatkan perhatian pada hak asasi manusia orang-orang yang tinggal di*

belahan bumi utara sementara mereka mengabaikan martabat dan tuntutan mayoritas penduduk dunia. [Negara-negara] yang membela hak asasi manusia dalam Konvensi [adalah] mereka [yang] melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di luar Konvensi, [karena] mereka menggelontorkan sejumlah besar uang untuk memicu perang sementara mereka menolak pendanaan yang diperlukan untuk mempromosikan solusi struktural yang dibutuhkan untuk mengubah sistem”.

Lebih lanjut dikatakan, *“Negara-negara maju menempatkan target 1,5°C sebagai target yang tidak dapat dinegosiasikan, tetapi pada saat yang sama mereka merusak satu-satunya langkah yang mungkin diperlukan untuk mencapainya dengan memaksakan target pengurangan emisi 2030 pada negara-negara berkembang yang mengarah pada kemiskinan dan ketergantungan ekonomi yang lebih besar”. Ia juga mengatakan bahwa “di dunia yang tidak adil dan tidak setara ini” negara-negara maju, yang secara historis bertanggung jawab atas penyebab masalah dan seharusnya melaksanakan sebagian besar tindakan mitigasi iklim “tidak dibuat bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Negara-negara berkembanglah yang memikul [ini].*

Bolivia mengatakan *“kita memerlukan [tujuan] keuangan yang akan memberi kita sumber daya yang kita butuhkan untuk mengambil langkah-langkah tersebut. Keuangan yang jauh di bawah kebutuhan kita merupakan penghinaan dan pelanggaran mencolok terhadap keadilan dan kesetaraan iklim”. Keputusan keuangan iklim, “memadamkan kerja sama internasional. Kita sedang beralih dari masa tanpa meninggalkan seorang pun ke era membiarkan setiap orang menyelamatkan dirinya sendiri. Keuangan iklim sebagaimana adanya saat ini tidak mengatasi status tidak adil dan tidak adil di seluruh planet ini”.*

Ia menegaskan kembali bahwa aksi iklim yang ambisius oleh negara-negara maju bergantung pada kepatuhan terhadap UNFCCC dan Pasal 9.1 PA, *“atas dasar penyediaan keuangan publik dari negara-negara maju yang secara tepat memenuhi persyaratan negara-negara berkembang,”* menambahkan lebih lanjut bahwa *“pendanaan iklim bukanlah amal [tetapi] kewajiban hukum negara-negara maju. Jumlah tujuan yang disepakati dalam keputusan ini mengabadikan ketidakadilan iklim dan tidak memenuhi tuntutan yang sah dari negara-negara berkembang. Pembayaran utang iklim adalah hak yang berhak diklaim oleh masyarakat negara-negara berkembang,”* Bolivia lebih lanjut menekankan.

Nigeria dalam intervensi yang sangat kuat, *“meminjamkan suaranya ke India”,* menambahkan bahwa *“itu akan menjadi kerugian besar bagi negara saya dan para wanita ... di negara-negara berkembang ... jika kita pulang dengan [mobilisasi] USD 300 miliar dan kita mengatakan bahwa negara-negara maju memimpin. Ini merupakan penghinaan terhadap apa yang dikatakan Konvensi”,* menambahkan bahwa *“negara-negara maju memiliki bagian terbesar dari emisi global historis dan saat ini.”* Dikatakan bahwa *“negara-negara maju [mengatakan] bahwa [mereka] memimpin dengan USD 300 miliar dolar hingga 2035”* dan bahwa ini *“adalah lelucon dan itu bukan sesuatu yang harus kita anggap enteng”* menambahkan bahwa ini bukan *“sesuatu yang harus kita tepuk tangan dan memaksa kita untuk mengambilnya”.* Ia meminta Para Pihak untuk *“memikirkannya kembali”* dan tidak hanya dengan menempatkan pernyataan-pernyataan ini dalam catatan proses. Ia mengatakan dengan tegas bahwa Nigeria

“tidak menerima ini” menjelaskan bahwa negara-negara berkembang diharapkan “memiliki NDC yang ambisius” dan bahwa “NCQG seharusnya memungkinkan kita untuk memiliki tujuan keuangan yang realistis” menambahkan bahwa “USD 300 miliar tidak realistis” dan bahwa kita tidak boleh bertepuk tangan.

Malawi, untuk LDCs menyatakan persetujuannya dengan India, Bolivia, dan Nigeria. Dikatakannya bahwa *“tujuan ini bukan yang kami harapkan ... Itu tidak ambisius bagi kami”* berdasarkan kebutuhan yang tercermin pada kesenjangan keuangan iklim. Mengenai masalah alokasi khusus untuk LDCs, dikatakan bahwa keputusan tersebut tidak menyediakan pembagian sumber daya yang seharusnya diberikan kepada LDCs dan Negara-negara Kepulauan Kecil Berkembang [SIDs]. Mereka juga kecewa karena tidak ada refleksi dalam teks untuk penyediaan dana khusus untuk kerugian dan kerusakan dan menyatakan keberatan untuk menerima keputusan yang diadopsi.

Kuba mengatakan bahwa mereka “sangat menyesalkan hasil yang tidak memadai yang diperoleh terkait keuangan iklim” dan “bahwa mereka tidak setuju dengan tujuan keuangan iklim”, menambahkan bahwa ruang lingkup keputusan yang diadopsi menunjukkan kurangnya kesepakatan di antara negara-negara maju dan “mencerminkan niat mereka yang jelas untuk melepaskan tanggung jawab mereka, yang secara historis dan hukum telah diakui dalam Konvensi dan Perjanjian Paris.”

Mereka menambahkan bahwa tujuan baru tersebut *“meningkatkan aliran sumber daya dari belahan bumi selatan ke belahan bumi utara dalam dinamika kolonialisme lingkungan yang berkelanjutan. Sasaran keuangan baru, sebagaimana adanya, tidak menanggapi persyaratan minimum yang telah ditetapkan dan sama sekali tidak akan mengarah pada perbaikan situasi. Janji sebesar USD 300 miliar saat ini mewakili lebih sedikit bagi negara-negara berkembang dibandingkan dengan USD 100 miliar pada tahun 2009”. Lebih lanjut, Kuba mengatakan bahwa jika inflasi diperhitungkan selama bertahun-tahun, angkanya rendah, dan merupakan “kontras yang mengkhawatirkan dengan anggaran pertahanan negara-negara maju,”* seraya menambahkan bahwa Kuba tidak melihat “jaminan dukungan yang cukup untuk NDC.”

Kuba juga menyatakan bahwa Kuba menolak upaya negara-negara maju untuk memberlakukan standar baru untuk pengurangan emisi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi dan Perjanjian Paris, sementara upaya tersebut juga melemahkan tanggung jawab mereka sendiri atas sarana implementasi. Kuba lebih lanjut mengatakan bahwa negara-negara maju memiliki utang ekologis dan iklim terhadap kemanusiaan yang harus dibayar, dan “tidak dapat membuat kita bertanggung jawab atas konsekuensi pola produksi dan konsumsi mereka yang tidak berkelanjutan”.

Pakistan mengatakan bahwa mereka *“meninggalkan Baku dengan perasaan campur aduk dan berat hati” dengan mencatat “kesenjangan kritis dalam keputusan yang diambil”*. Sasaran keuangan yang diajukan oleh negara-negara maju tidak sesuai dengan kebutuhan NDC dan Rencana Adaptasi Nasional negara-negara berkembang, tambahnya, lebih lanjut mengatakan bahwa *“kami menuntut keadilan iklim. Ini bukan amal, ini kewajiban moral. Negara-negara*

terpaksa menggunakan pinjaman untuk menangani tantangan dampak iklim. [Krisis] iklim berubah menjadi krisis utang karena cara pelaksanaannya tidak jelas”.

Uni Eropa mengatakan, *“kami merasa bahwa hasil hari ini sebenarnya sangat penting. Kita hidup di masa geopolitik yang benar-benar menantang dan kita seharusnya tidak memiliki ilusi bahwa keadaan akan segera membaik. Jadi, melihat kesepakatan benar-benar luar biasa. Tahun lalu ... COP 28 adalah awal dari berakhirnya bahan bakar fosil dan sekarang ... COP 29 akan dikenang sebagai awal era baru untuk pendanaan iklim dan Uni Eropa beserta negara-negara anggotanya akan terus memainkan peran utama ... untuk memastikan bahwa ada lebih banyak uang yang tersedia. Kami melipatgandakan target USD100 miliar menjadi USD300 miliar dan kami merasa itu ambisius, dibutuhkan, realistis, dan dapat dicapai. Kami yakin bahwa ini akan menjadi kisah nyata dan kami telah bekerja keras untuk mendukung khususnya mereka yang paling rentan.”* Lebih lanjut ditambahkan, *“akses ke pendanaan akan meningkat. Kami telah sepakat untuk lebih meningkatkan pendanaan adaptasi dan itu adalah area di mana uang publik benar-benar menjadi kekuatan pendorong”.* Mengenai perluasan basis donor, UE mengatakan, *“ini juga masalah keadilan dan penting bagi kami bahwa semua pihak yang mampu berkontribusi dan oleh karena itu, mengingat besarnya masalah ini, adalah baik untuk memperluas basis kontributor secara sukarela, dan kami juga melihat perluasan historis dari peran MDB yang sangat penting dalam mendukung transisi ini. Ini hanya akan mendatangkan lebih banyak uang swasta dan itulah yang kami butuhkan dan dengan dana ini dan dengan struktur ini, kami yakin kami akan mencapai target USD 1,3 triliun”.*

Mengenai mitigasi, dikatakan, *“kami menginginkan lebih karena dunia membutuhkan lebih banyak dari itu”, dan menyerukan penggandaan upaya di COP30, dengan “NDC baru yang lebih ambisius”.* UE juga menyambut baik keputusan yang berkaitan dengan Pasal 6 Perjanjian Paris tentang pasar karbon, dengan mengatakan *“kami telah menyaksikan kesimpulan historis dari buku aturan untuk pasar karbon. Kami sekarang memiliki standar dengan stempel persetujuan PBB di atasnya dan ini akan mendorong investasi, meningkatkan ambisi dan membawa transparansi dan standar yang lebih tinggi.”* Dikatakan pada COP29, *“kami telah mencapai tujuan keuangan iklim dan peningkatan basis donor”, dan “juga telah mencapai tujuan untuk menciptakan aturan tepercaya bagi pasar karbon internasional” tetapi “akan lebih baik jika kami lebih menekankan pada mitigasi dan bahasa yang lebih kuat dalam teks tentang gender dan hak asasi manusia”.*

KEPUTUSAN UTAMA LAINNYA YANG DIADOPSI

Beberapa keputusan utama lainnya yang telah diadopsi terkait dengan Tujuan Global tentang Adaptasi, dan Program Kerja Mitigasi, yaitu ambisi mitigasi Sharm-el-Sheikh dan program kerja implementasi. Keputusan-keputusan ini bersama dengan keputusan NCQG dan keputusan tentang pasar karbon berdasarkan Pasal 6.2 dan 6.4 Perjanjian Paris dinyatakan sebagai “Pakta Persatuan Iklim Baku” oleh Presidensi. Keputusan-keputusan utama yang terkait dengan Pasal 6.2 dan 6.4 juga diadopsi. Keputusan untuk memperpanjang program kerja Lima yang disempurnakan tentang gender selama sepuluh tahun juga diadopsi.

Tidak ada keputusan yang dapat diambil terkait dialog UEA tentang penerapan hasil inventarisasi global (dialog UEA), yang merupakan salah satu isu utama yang diperdebatkan di COP ini. Presidensi mengumumkan bahwa masalah tersebut akan dipertimbangkan pada sesi berikutnya [Juni 2025] Badan Pendukung atau *Subsidiary Body [SB]* UNFCCC, untuk merekomendasikan rancangan keputusan yang akan dipertimbangkan di Belem, Brasil pada COP 30.

Mengenai Program Kerja Transisi yang Adil UEA, yang merupakan isu penting dan kontroversial lainnya, keputusan prosedural telah diambil dan diskusi tentang masalah tersebut diharapkan akan berlanjut pada sesi SB berikutnya.

Ketua SB yang baru juga ditunjuk pada rapat pleno penutupan bersama Adonia Ayebare (Uganda) untuk Badan Pendukung untuk Konsultasi Ilmiah dan Teknologi dan Julia Gardiner (Australia) untuk Badan Pendukung Pelaksanaan.

Sumber Artikel Terjemahan:

Artikel TWN, diakses dari

<https://twon.my/title2/climate/news/Baku01/TWN%20update%2012.pdf>

Diterjemahkan oleh:

Komang Audina Permana Putri

Program Officer Isu Keuangan Berkelanjutan dan Utang,
Indonesia for Global Justice